



Dewan Soroti Minimnya Dana Koperasi

YOGYA, TRIBUN - Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menyoroti anggaran koperasi yang dinilai masih minim pada pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Diketahui program peningkatan koperasi pada KUA-PPAS berada di angka Rp1,2 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, angka tersebut masih akan dibagi lagi ke dalam beberapa program dan sejumlah kegiatan, sehingga peran koperasi dalam menurunkan angka kesenjangan ekonomi di wilayah setempat diragukan. Selain itu, kondisi yang demikian dinilainya juga masih jauh dari semangat demokrasi ekonomi.

"Kalau KUA-PPAS APBD 2020 tidak berpihak kepada pembangunan, pemberdayaan, dan penumbuhan koperasi serta kebijakan wali kota tidak menerapkan demokrasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi rakyat, maka dapat dipastikan kesenjangan ekonomi akan semakin tajam dan tingkat gini ratio akan meningkat," kata dia dikutip dalam keterangan tertulis.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta, Prabaningtyas menjelaskan, tahun ini dana APBD untuk peningkatan kapasitas koperasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Hal ini dikarenakan, Kota Yogyakarta cukup baik dalam pelaporan anggota dan lain sebagainya cukup baik. "Tahun ini kita yang paling besar kedua di DIY. Dibanding tahun lalu kita yang paling terkecil," urainya.

Dijelaskannya, anggaran senilai Rp1,2 miliar itu berasal dari dana alokasi khusus dari Kemenkop senilai Rp564,6 juta. Sementara pada tahun ini berada di angka Rp1,1 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam memperingati hari koperasi pada tahun depan, karena Kota Yogyakarta akan berkesempatan menjadi tuan rumah. "Selain untuk pengembangan, kita juga gunakan untuk membangun kelompok prakoperasi di tiap kecamatan," jelas Praba.

Pihaknya pun juga melakukan penilaian terhadap kelompok prakoperasi dari tiap kecamatan. Ada sejumlah

indikator yang dinilai dari kelompok itu guna mempersiapkan kelompok prakoperasi menjadi koperasi. Dengan langkah ini, upaya untuk menumbuhkan kembang kembang koperasi dinilai menjadi lebih muah daripada membuat atau membuka koperasi dari awal.

Saat ini terdapat 364 koperasi di Kota Yogyakarta dari yang semula sekitar 500-an dan masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Penyederhanaan koperasi itu dilakukan karena instruksi dari Kemenkop untuk menutup koperasi yang bermasalah dan tidak melaksanakan kegiatan.

Setiap tahun juga dilakukan pengukuran tingkat kesehatan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Sementara untuk koperasi secara umum juga dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk melihat sejauh mana koperasi berperan dalam kehidupan masyarakat. "Dari hasil pemeriksaan kami padatutup buku 2018 untuk penilaian kesehatan, sekitar 80 persen koperasi di Jogja sehat, sementara sisanya cukup sehat," imbuhnya. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005